

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Laporan tahunan (*annual report*) pada dasarnya adalah sumber informasi bagi investor sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dalam pasar modal, juga sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Kartika, 2009). Pengungkapan laporan keuangan menjadi faktor yang signifikan dalam pencapaian dan akuntabilitas publik sehingga proses pembuatan laporan keuangan tidak dapat dipisahkan dari penelitian mengenai kelengkapan pengungkapan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Laporan keuangan tahunan suatu perusahaan dapat memberikan gambaran kinerja selama satu tahun dan dapat memprediksikan masa depan perusahaan tersebut. Tujuan Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (PSAK No. 1 paragraph 5).

Pengungkapan merupakan salah satu alat yang penting untuk mengatasi masalah keagenan antara manajemen dan pemilik, karena dipandang sebagai upaya untuk mengurangi asimetri informasi (Chow dan Wong Boren, 1987; Healy

dan Palepu, 1993 dalam Khomsiyah, 2005). Pengungkapan (*disclosure*) atas pelaporan keuangan terutama ditujukan kepada investor dan kreditor. Selain itu untuk pemerintah, karyawan, konsumen, serta masyarakat. Menurut Burns et al. (2005) bentuk pengungkapan laporan keuangan ditentukan oleh instrumen yang dirancang untuk investor dalam menilai kinerja, investasi, posisi dan prospek masa depan dan juga membantu penasihat dalam memilih dan merekomendasikan investasi yang sesuai serta konsisten dengan tujuan dari klien mereka.

Pasar modal yang efisien harus dapat memberikan perlindungan kepada investor publik dari praktik bisnis yang tidak sehat, tidak jujur dan bentuk-bentuk manipulasi lainnya (Suta, 2000 dalam Benardi et al., 2009). Investor melakukan investasi dengan dua tujuan dasar yaitu untuk mencari keuntungan yang lebih tinggi dan untuk meminimalkan risiko (Young dan Guenther, 2003 dalam de Medeiros, 2008). Suatu pasar surat berharga dianggap efisien bila harga-harga surat berharga mencerminkan sepenuhnya semua informasi yang tersedia (Hendriksen, 1998). Kerangka teori sinyal (*signaling theory*) menyebutkan bahwa dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat asimetri informasi antara manajer perusahaan dan pihak luar karena manajer perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (Wolk et al., 2000 dalam Lestari dan Chariri, 2007). Kewajiban pengungkapan informasi tertentu kepada publik akan mengurangi asimetri informasi baik antara manajemen dan investor maupun antar para investor (Nuswandari, 2009). Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Chow dan Boren (1987) dalam Benardi et al. (2009), secara empiris banyak

studi yang telah menguji bahwa pengungkapan laporan keuangan perusahaan dilakukan untuk mengendalikan konflik kepentingan antara pemegang saham, kreditur, dan manajemen.

Informasi keuangan dapat berupa laporan keuangan dan laporan non keuangan serta beberapa informasi lainnya. Laporan keuangan yang pokok terdiri dari laporan neraca (*balance sheet*), laporan rugi laba (*statement of income*) serta laporan perubahan modal (*Statement of Changes in Equity*). Laporan lainnya dapat berupa laporan sumber dan penggunaan kas, laporan perubahan laba kotor, laporan biaya produksi, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, diskusi dan analisa manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab laporan direksi atas laporan keuangan serta laporan-laporan yang berguna untuk analisis lainnya. Laporan keuangan pada pasar modal merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang independen.

Pengungkapan (*disclosure*) yang diterbitkan perusahaan ada dua jenis, pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang diwajibkan peraturan pemerintah dan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang tidak diwajibkan peraturan baik oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas lainnya. Struktur pengaturan yang diterapkan di Indonesia yaitu struktur pengaturan ganda (IAI dan Bapepam-LK). Bapepam-LK berkepentingan dengan tingkat pengungkapan dan apa yang harus diungkap terutama untuk kepentingan pendaftaran publik dan penawaran publik perdana. Peraturan Bapepam-LK dituangkan dalam bentuk keputusan Bapepam-LK. IAI

berfokus pada bagaimana mengungkapkan atau format pengungkapan terutama dalam pelaporan keuangan eksternal yang dituangkan dalam berbagai pasal dan tersebar di berbagai pernyataan standar.

Bapepam-LK dalam perannya sebagai badan pengawas merupakan salah satu lembaga yang mengatur tentang pengungkapan. Peraturan Bapepam-LK yang berkaitan dengan pengungkapan informasi diantaranya sebagai berikut. Peraturan Nomor: VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-97/PM/1996 yang disempurnakan dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-06/PM/2000 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Surat Edaran Ketua Bapepam-LK Nomor: SE-02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan Nomor: VIII.G.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-38/PM/1996 yang disempurnakan dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Hal-hal yang belum diatur oleh peraturan Bapepam-LK harus mengikuti PSAK yang berlaku.

Ada tiga konsep luas pengungkapan menurut Evans (2003) dalam Suwardjono (2008) yaitu pengungkapan memadai (*adequate disclosure*), pengungkapan wajar atau etis (*fair or ethical disclosure*) dan pengungkapan penuh (*full disclosure*). Pengungkapan memadai (*adequate disclosure*) adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar laporan keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Pengungkapan wajar (*fair disclosure*) adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak

mendapat perlakuan atau pelayanan informasi yang sama. Sedangkan pengungkapan penuh (*full disclosure*) menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan.

Setiap perusahaan publik diwajibkan mengeluarkan laporan tahunan yang memenuhi tingkat pengungkapan minimum atau *adequate disclosure*, dimana pada tingkat ini investor dapat menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan. Praktik atas peraturan pengungkapan laporan keuangan seperti yang telah diatur oleh IAI dan Bapepam-LK harus diperhatikan untuk memastikan peraturan tersebut dipatuhi.

Pengungkapan dengan banyak informasi sama tidak menguntungkannya dengan terlalu sedikit informasi. Sehingga diperlukan kriteria untuk menentukan batas atas dan batas bawah. Batas atas cenderung lebih banyak menimbulkan kontroversi, terutama bagi penentu kebijakan untuk menentukan seberapa luas pengungkapan harus dilakukan lebih problematik dibandingkan dengan informasi yang tidak perlu diungkapkan, semakin banyak informasi yang diungkapkan maka semakin besar biaya untuk menyediakan informasi tersebut. Selain itu perusahaan berkeberatan menambah pengungkapan karena dengan menyediakan informasi yang bernilai akan menjadi keuntungan bagi pesaingnya (Nuswandari, 2009).

Masalah pengungkapan laporan keuangan telah lama dibahas dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Studi empiris mengenai pengaruh pengungkapan informasi akuntansi di pasar modal telah dihasilkan baik pengungkapan wajib maupun pengungkapan sukarela tetapi terdapat hasil penelitian yang beragam (Benardi, 2009). Hal tersebut dapat dikarenakan dasar

acuan untuk mengukur tingkat pengungkapan tidak sama serta obyek penelitiannya yang berbeda, perbedaan sifat variabel dependen dan variabel independen yang diteliti, perbedaan periode pengamatan, jenis pengungkapan, peraturan yang berlaku, dan atau metodologi statistik yang digunakan. Luas pengungkapan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, kepemilikan perusahaan, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. La Porta et al. (2006) dalam Arping dan Sautner (2010) menyatakan bahwa pada tingkat negara, standar keterbukaan yang lebih ketat tampaknya dikaitkan dengan perkembangan pasar uang.

Mulai tahun 1990-an perhatian atas pengungkapan laporan keuangan mulai meningkat seiring dengan efektifnya pasar modal (*capital market*). Tahun 1991 AICPA membentuk Komite Jenkins yang bertugas mengajukan rekomendasi tentang karakteristik informasi yang harus disediakan oleh manajemen dan batas-batas auditor harus mengungkapkan berbagai aspek dari informasi tersebut. Tahun 1995 Komisioner *Securities Exchange Commissions* (SEC) Steven William mengusulkan suatu model pengungkapan yang disebut model pelaporan alternatif lima lapis (*a five alternative reporting model*). Model dari William merupakan penjabaran model FASB yang cenderung merupakan kriteria penyajian. Uraian mengenai apa yang harus diungkapkan diatas menunjukkan bahwa masalah pengungkapan belum terjawab secara tuntas dan lingkup pengungkapan masih harus dikembangkan baik yang wajib maupun yang sukarela (Suwardjono, 2008).

Penelitian tentang pengungkapan kelengkapan laporan keuangan. Nugraheni et al. (2002) dalam Kartika (2009) menguji faktor-faktor fundamental perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Hashim dan Shaleh (2005) meneliti pengungkapan sukarela pada perusahaan MNCs di Malaysia. Aljifri dan Hussainey (2006) dalam Benardi et al. (2009) meneliti pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan. Rahayu (2008) meneliti pengaruh tingkat ketaatan pengungkapan wajib dan sukarela terhadap kualitas laba. Benardi et al. (2009) meneliti luas pengungkapan terhadap asimetri informasi. Kartika (2009) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

*Securities Exchange Commision* (SEC) menuntut lebih banyak pengungkapan dibanding *Financial Accounting Standart Board* (FASB) karena pelaporan keuangan memiliki aspek sosial dan publik (*public interest*) sehingga meliputi informasi kuantitatif dan kualitatif. SEC mewajibkan perusahaan publik menyajikan dua laporan tahunan yang diserahkan ke SEC untuk memenuhi ketentuan dalam *Securities Exchange Act* 1934 dan satu laporan tahunan untuk keperluan pemegang saham dan pihak eksternal lainnya.

Arping dan Sautner (2010) berpendapat bahwa *Sarbanes Oxley Act of* 2002 (SOX) merupakan contoh utama bagi pengungkapan substantif dan reformasi pemerintahan. Alasannya adalah bahwa SOX tidak hanya berlaku untuk perusahaan yang tercatat berdomilisi di Amerika tetapi juga untuk perusahaan asing yang lintas terdaftar sehingga perusahaan mengalami peningkatan

transparansi mengikuti perjalanan dan pelaksanaan SOX, peningkatan ini secara signifikan lebih besar bagi perusahaan-perusahaan lintas terdaftar. Peraturan ini (SOX) memperkenalkan perubahan yang berarti pada pertanggungjawaban manajemen serta lingkup dan dasar tanggungjawab auditor (Zhang dan Simon, 2005)

PricewaterhouseCoopers (1999) dalam Khomsiyah (2005) menyatakan bahwa Indonesia berada pada urutan yang sangat rendah dalam persepsian standar akuntabilitas, proses penentuan dewan, pelaksanaan auditing dan ketaatannya, serta pengungkapan dan transparansinya. Khomsiyah dalam penelitiannya terhadap perusahaan publik di Indonesia tahun 2003 dengan sampel 41 emiten menemukan bahwa tingkat pengungkapan wajib rata-rata sebesar 74,97% dan pengungkapan sukarela rata-rata sebesar 47,16% dari 49 item. Hasil ini menunjukkan bahwa praktik pengungkapan wajib sudah banyak ditaati, tetapi kesediaan untuk memberikan pengungkapan sukarela masih relatif rendah.

Pengukuran indeks pengungkapan diperlukan untuk memastikan seberapa patuh suatu perusahaan terhadap peraturan dan standar pengungkapan laporan keuangan yang ditetapkan oleh Bapepam-LK dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Semakin tinggi tingkat pengungkapan yang dipatuhi maka semakin tinggi harapan terhadap laporan tahunan dalam memberikan informasi yang benar dan memadai (Baridwan et al., 2001).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan yang



meliputi pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya perubahan mengenai beberapa hal. Variabel dalam penelitian ini mencakup pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela sebagai variabel dependen yang dinyatakan dengan indeks kelengkapan pengungkapan. Penelitian ini menganalisa data lebih dari satu periode sebagai penyempurna penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan data *cross sectional* untuk data satu periode. Item pengungkapan wajib mengikuti *checklist* yang pernah dibuat oleh Konsultan Deloitte Touche Tohmatsu yang bekerja sama dengan Bapepam-LK, yaitu “*Disclosure Checklist Based on The Indonesian Accounting Standards and Bapepam-LK Rules*”. Hal tersebut untuk menguji apakah variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan dalam penelitian ini konsisten dalam waktu yang berbeda.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan alasan bahwa pengungkapan laporan keuangan dapat memberikan gambaran umum dan analisa atas praktik-praktik akuntansi yang ada. Hasil dari penelitian akan memberikan jawaban tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Motivasi utama untuk mengejar studi ini adalah untuk menekankan pentingnya membangun hubungan teoritis antara sifat laporan keuangan wajib dan jumlah informasi yang diberikan oleh pengungkapan sukarela. Atas dasar tersebut, maka judul penelitian ini adalah “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”.

## **B. Perumusan Masalah**

Ada dua pokok permasalahan dari penelitian ini yang perlu dicari jawabannya.

1. Bagaimana tingkat kelengkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Apakah *leverage*, likuiditas, profitabilitas, kepemilikan saham, dan umur *listing* perusahaan mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tiga tujuan sebagai berikut.

1. Mengukur tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya perusahaan manufaktur.
2. Menguji secara empiris pengaruh *leverage*, likuiditas, profitabilitas, kepemilikan saham, dan umur *listing* perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat.

1. Bidang Akademik. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia.
2. Perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan motivasi tentang pentingnya pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela pada laporan keuangan suatu perusahaan.
3. Peneliti. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan dapat digunakan sebagai acuan pengembangan penelitian selanjutnya.
4. Lembaga-lembaga terkait. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan dan informasi yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan masukan bagi lembaga-lembaga terkait untuk pengembangan peraturan dan standar akuntansi.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Pokok pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut.

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berupa penjelasan yang mendasari penelitian ini, serta hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan dan berkaitan dengan pengaruh *leverage*, likuiditas, profitabilitas, kepemilikan saham, dan umur *listing* perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, obyek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

## BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis mencoba menganalisa dan membahas pengaruh *leverage*, likuiditas, profitabilitas, kepemilikan saham, dan umur *listing* terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil penelitian.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, kelemahan atau keterbatasan, serta saran atau

masukan untuk penelitian serupa selanjutnya dan bagi pihak yang berkepentingan lainnya.